Bawaslu Rekrut 754 Pengawas TPS

WATES (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulonprogo akan melakukan proses rekrutmen terhadap Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) untuk Pilkada 2024. Jumlah personil pengawas TPS yang akan direkrut sebanyak 754 orang.

Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto menyampaikan hal tersebut menyusul terbitnya Keputusan Bawaslu RI Nomor Nomor: 301/HK.01.01/ K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas TPS pada Pemilihan tahun 2024. Keputusan tersebut tertanggal 10 September 2024.

"Sesuai Keputusan Bawaslu RI tersebut, waktu pendaftaran dan penerimaan berkas bagi pelamar Pengawas TPS kali ini cukup lama, yakni tanggal 12-28 September 2024,"

KR-Widiastuti

Marwanto.

ujarnya, Rabu (12/9).

Ditambahkan, beberapa persyaratan untuk menjadi Pengawas TPS di antaranya adalah WNI, berusia paling rendah 21 tahun saat mendaftar, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, bersedia bekerja penuh waktu, dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Dalam rekrutmen Pengawas TPS ini, Panwaslu Kecamatan akan membentuk panitia rekrutmen PTPS. Meski sudah membentuk panitia yang beranggotakan komisioner dan sekretariat Panwaslu Kecamatan, namun Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan kepada Panwaslu Kalurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran. "Sesuai regulasi, kewenangan membentuk Pengawas TPS ini ada di tingkat kecamatan, dilakukan oleh teman-teman Panwascam, namun dalam praktiknya untuk penerimaan dan penelitian berkas bisa didelegasikan ke teman-teman PKD," tutur Marwanto.

(Wid)

PENDAFTARAN CASN DITUTUP

2.580 Pendaftar, Dokter Spesialis Hanya 2 Orang

WONOSARI (KR) - Pendaftar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Gunungkidul cukup tinggi. Sampai pendaftaran ditutup data Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul mencatat terdapat sebanyak 2.580 pendaftar CASN. Dari jumlah tersebut untuk formasi dokter spesialis paling sepi pendaftar dan hanya ada dua orang.

Kepala Bidang Formasi, Pengembangan, dan Data Pegawai BKPPD Gunungkidul, M. Farid Juni Haryanto mengatakan formasi paling sepi pendaftar adalah dokter spesialis dan terbanyak sebagai auditor ahli pertama.

"Pendaftar dokter spesialis paling sedikit diminati pendaftar," katanya.

Khusus dokter spesialis terdapat dua pendaftar spesialis jantung dan pembuluh darah, dan satu spesialis kedokteran jiwa. Untuk pendaftaran CASN ini sudah ditutup sejak dua hari lalu pukul 23.59 WIB dengan membuka lowongan sebanyak 89 formasi, terbagi menjadi 60 formasi untuk tenaga kesehatan dan 29 formasi untuk tenaga teknis. Pendaftar CASN ini terjadi pasca penggunaan meterai tempel.

Setelah pendaftaran resmi ditutup, BKPPD akan melakukan seleksi administrasi dokumen pendaftar. BKPPD akan mengklasifikasikan berkas dalam dua kelompok memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). "Seleksi lanjutan CASN nantinya akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)," imbuhnya.

Sistem ini akan mencegah praktik joki. Kalau ada pihak yang mengaku bisa meloloskan CASN itu tidak benar. Lolos tidaknya pendaftar murni tergantung usaha pendaftar sendiri. Sementara untuk formasi guru akan dibuka ketika pendaftaran calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"KabupatenGunungkidul kekurangan 748 guru. Rinciannya jenjang Sekolah Dasar (SD) kurang 483 guru dan sekolah menengah pertama (SMP) kurang 265 guru," jelas Sekretaris Disdik Gunungkidul, Agus Subariyanta.

(Bmp)

Gunungkidul Diguncang Gempa 4,5 Magnitudo

WONOSARI (KR) - Kabupaten Gunungkidul kembli diguncang gempa bumi berkekuatan 4,5 Magnitudo (M) pada pukul 10.25 WIB Kamis (12/9) kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul menyebutkan meskipun gtran gempa dirasakan seluruh wilayah tetapi belum ada laporan adanya kerusakan terdampak gempa tersebut. Dilansir dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8.72∞ LS; 110.25∞ BT tepatnya di laut pada jarak 90 km arah Barat Daya Kabupaten Gunungkidul, DIY dengan kedalaman 30 Km. Adapun, gempa ini dirasakan (skala MMI) II Gunung Kidul, II Wonogiri, II Bantul, II Pacitan. " Sampai saat ini tidak ada laporan adanya kerusakan terdampak gempa dan mudah-mudahan tidak ada kerusakan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunungkidul Purwono, Kamis (12/9).

Pihaknya mengimbau, masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan namun tetap waspada jika sewaktu-waktu terjadi gempa . Masyarakat agar selalu mengutamakan mitigasi bencana serta memantau informasi bencana lewat laman resmi baik dari BMKG maupun BPBD, jangan sampai mencari informasi yang salah. Diakunya bahwa dalam beberapa bulan terakhir sering terjadi gempa . Saat disinggung apakah gempa ini berkaitan dengan potensi gempa Megathrust, Purwono mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari BMKG.

(Bmp)

JELANG PILKADA 2024

ASN Tak Netral Akan Ditindak Tegas

WONOSARI (KR) - Pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan berkaitan dengan netralitas menjelang penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung pada akhir November 2024 mendatang. Saat ini pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Bawaslu secara intens mulai melakukan pengawasan. Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan pihaknya bersama dengan instansi terkait akan terus melakukan pengawasan.

"Dengan pengawasan ketat diharapkan tidak ada ASN yang menjadi tim sukses atau ikut terlibat dalam kegiatan Pilkada Gunungkidul 2024 mendatang," katanya.

Terkait dengan hal tersebut pihaknya telah membuat surat edaran Nomor 2 tahun 2024 tentang Netralitas ASN Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Selain itu juga surat edaran nomor 800.1.8.1/18 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan mengharap agar setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan terutama partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. "Masing-masing OPD wajib melakukan sosialisasi tentang netralitas dan mengidentifikasi pelanggaran ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemkab Gunungkidul menghadapi Pilkada 2024," ujarnya.

Selain para pegawai di lingkungan Pemkab Gunungkidul, pihaknya mengingatkan agar Lurah hingga ke tingkat pamong juga berkomitmen untuk menjaga netralitas di Pilkada Gunungkidul pada 27 November 2024 mendatang.

Langkah ini untuk menjaga keamanan dan kondusif sehingga pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Diantaranya, ASN dan Non-ASN tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu calon. Dan tidak ada keberpigakan terhadap paslon. Apabila terdapat ASN-Non ASN melanggar tentang netralitas ini dipastikan akan mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaju. "Kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu jika menemukan adanya ASN yang terlibat akan diproses," tandasnya.

(Bmp)

VAKSINASI KALANGAN ANAK

Dinkes Pastikan Tak Ada Laporan KIPI

KR-Asrul Sani

Siswa SMP divaksin JE.

WATES (KR) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo, dr Sri Budi Utami mengatakan, banyaknya kegiatan vaksinasi berpotensi munculnya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). KIPI yang dialami bisa berupa gejala demam dan nyeri pada bagian bekas suntikan.

"Sejauh ini tidak ada laporan KIPI, justru kami mengantisipasi adanya penolakan dari orang tua anak terkait vaksinasi," katanya, Rabu (11/9).

Seperti diketahui Dinkes Kulonprogo sedang melakukan banyak vaksinasi pada kelompok anak-anak selama beberapa waktu terakhir. Setidaknya tiga jenis vaksinasi yang dilakukan.

Sri Budi Utami mengungkapkan, belum lama ini pihaknya melaksanakan vaksinasi Polio yang merupakan bagian dari program Pekan Imunisasi Nasional (PIN). "September ini kami juga memulai pelaksanaan vaksinasi Japanese Encephalitis (JE)," jelasnya.

Dinkes setempat juga melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) secara rutin setiap tahun.

Pihaknya mengklaim belum ada kasus penolakan vaksinasi di Kulonprogo. Dinkes menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi JE saat ini masih berlangsung dan rencananya berakhir 31 Oktober mendatang. Sebanyak 81 ribu anak di Kabupaten Kulonprogo jadi sasaran pemberian vaksin JE lewat suntikan. "Target capaiannya secara nasional 95 persen, tapi kami berupaya agar bisa lebih dari itu," ujarnya.

Pelaksanaan PIN Polio dua putaran juga sudah mencapai 97 persen. Tapi langkah penyisiran tetap dilakukan untuk memastikan seluruh target sasaran menerima vaksin.

(Rul)

KEMENPAN-RB VERIFIKASI LAPANGAN

Kemenag Kulonprogo Komitmen Layani Kelompok Rentan

PENGASIH (KR) - Kankemenag Kulon Progo terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Bahkan memberikan prioritas yang terbaik bagi pengguna layanan yang tergolong kelompok rentan, yakni lansia, wanita hamil atau menyusui, dan kelompok disabilitas. Terkait itu, Tim Lapangan KemenPAN-RB melakukan verifikasi, Kamis (12/9).

"Kami berinovasi dengan program Lenteraku. Yakni Layanan Efektif Untuk Kelompok Rentan Kankemenag Kulon Progo. Program ini untuk memberikan prioritas layanan kepada kelompok rentan. Sehingga diharapkan pelayanan dapat berjalan lebih maskimal, cepat, serta profesional," ujar Kepala Kankemenag Kulonprogo HM Wahib Jamil SAg MPd di hadapan Tim Verifikasi.

KR Widiastuti

Kepala Kankemenag Kulonprogo menerima Tim Verifikasi.

Hadir dalam verifikasi lapangan Kedeputian Pelayanan Publik KemenPAN-RB Raissa Nabilah dan Nanang Khairuddin, Ketua Tim Pelayanan Publik Biro Ortala Kemenag RI Chilyati yang hadir bersama Puji Astuti dan Riza Nugraha Putra. Dari Kulonprogo turut hadir Kepala Dinas Dukcapil, Ketua Baznas, Bagian Kesra, Ketua Pertuni, dan Kepala SLBN 1 Kulonprogo.

Dikatakan, dalam upaya memberikan pelayanan ramah kelompok rentan ini tidak bisa berjalan sendiri, tapi menjalin komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Di antaranya dengan Pemerintah Daerah dan Baznas Kabupaten Kulonprogo melalui program Safari Jumat, Bedah Rumah Keluarga Kurang Mampu, dan bantuan korban bencana.

Layanan pernikahan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk penerbitan dokumen kependudukan serta SLBN 1 Kulonprogo untuk penerjemah Bahasa Isyarat.

(Wid)